

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Dusun Sidakan Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo

Suranto, Atiek Septi Winarsih

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas/Muhammadiyah Yogyakarta
 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. 55183. Telepon: 0274-387656 ext 161
 Email: suranto@umy.ac.id
 DOI: <https://doi.org/10.18196/ppm.51.1006>

Abstrak

Aktivitas pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyusun dan mengupdate data administrasi kependudukan di dusun Sidakan yang berbasis IT yang mudah diaplikasikan. Adapun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut melalui observasi, Wawancara, FGD dan pengumpulan data di tingkat Dusun. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa bahwa program berlangsung dengan baik dan lancar. Program ini mampu menghasilkan dokumen database dusun Sidakan yang update dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pelayanan kependudukan bagi masyarakat. Adapun kendala yang muncul pada tahap awal kegiatan dapat diatasi dengan metode pendampingan intensif. Adapun saran yang diajukan dari hasil program PPM ini, hendaknya Pemerintah Desa bisa mengupdate perkembangan database secara rutin seiring dinamika data yang terjadi.

Kata Kunci: Tata Kelola Dusun, Administrasi Kependudukan, Administrasi Dusun

Abstract

This community service activity aims to compile and update population administration data in the Sidakan hamlet that is based on IT that is easy to apply. The methods used to achieve this goal are through observation, interviews, FGD and data collection at the hamlet level. The results of the activities indicated that the program was going well and smoothly. This program is able to produce an updated and useful Sidakan database document for improving the quality of population services for the community. The obstacles that arise in the early stages of activities can be overcome by intensive mentoring methods. As for the suggestions submitted from the results of this PPM program, the Village Government should be able to update the database development regularly in line with the dynamics of the data

Keywords: Village Governance, Population Administration, Village Administration

Pendahuluan

Pelayanan administrasi desa di Desa Banaran masih terkendala beberapa hal yang perlu yang harus diatasi. Untuk itu dalam pengembangan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan desa berbasis informasi dan teknologi (IT) yang memiliki fungsionalitas seperti pencatatan data pengajuan surat beserta mengarsipkan persyaratannya, mencetak bukti pengajuan sebagai bukti pengambilan surat di kantor desa, melihat progres surat yang telah diajukan, memberikan pengingat kepada pemohon jika surat yang dibuat telah selesai. Sehingga diharapkan pelayanan administrasi desa di Desa Wates dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Kantor desa Banaran yang ada di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan yang terlibat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya mengatur kepentingan masyarakat, Kantor Desa Banaran memberikan pelayanan administrasi untuk mengajukan pembuatan surat keterangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat Desa Banaran yaitu Kepala Dusun Sidakan, proses pelayanan administrasi Desa Wates masih ditemukan beberapa kendala yang harus diatasi. Adapun kendala yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya penyebaran informasi kepada warga Desa tentang persyaratan pembuatan surat keterangan desa, sehingga ada beberapa warga desa yang persyaratannya tidak lengkap dan mengakibatkan pengajuan pembuatan surat tidak dapat diproses.
2. Pengajuan surat keterangan hanya dilakukan secara *onsite* sehingga pemohon memiliki keterbatasan waktu untuk mengajukan surat pada jam kerja.
3. Penyimpanan persyaratan pembuatan surat masih dilakukan dengan manual dengan bentuk hardcopy yang membutuhkan tempat penyimpanan luas, sering menyebabkan hilangnya dokumen persyaratan atau terselip di surat-surat lainnya dan membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali.
4. Proses pembuatan surat masih menggunakan Microsoft Word yang membuat petugas mengetik ulang data atau template surat, dan belum disimpan dengan menggunakan *database* khusus yang dapat menyebabkan duplikasi data.
5. Tidak adanya bukti pengajuan surat untuk pemohon yang digunakan untuk pengambilan surat sehingga petugas kesulitan mencari data pengajuan pada buku registrasi pengajuan pembuatan surat.

Berdasarkan temuan di atas menunjukkan bahwa Dusun Sidakan Banaran Galur Kulonprogo **belum** memiliki tata kelola administrasi dusun yang valid dan realibel.

Metode Pelaksanaan

1. Observasi awal untuk memetakan permasalahan mitra.

Pemetaan permasalahan mitra ini dilakukan dengan cara *focus group discussion (FGD)* dengan tokoh masyarakat, kepala dusun dan juga aparatur desa setempat. Selain itu, juga dilakukan wawancara secara mendalam dengan Kepala Dusun Sidakan Banaran dan beberapa masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait permasalahan yang mitra sedang hadapi,

2. Kolaborasi dengan stakeholder lain

Kolaborasi dengan stakeholder lain dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan program-program pengabdian masyarakat khususnya dalam tata kelola administrasi Dusun Sidakan. Adapun pihak-pihak yang akan dilibatkan adalah Tim pengusul, Mahasiswa, Perangkat Dusun Sidakan, Pemerintah Desa Banaran, dan masyarakat Dusun Sidakan.

3. Pelaksanaan Program Kegiatan: Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu: (a) Pembuatan *database* kependudukan Dusun Banaran, yang meliputi informasi demografi Dusun berdasarkan usia, pekerjaan, jenis kelamin dan pendidikan. (b) Pembuatan Peta Dusun dan (c) Penomoran Rumah Warga Dusun Sidakan

4. Monitoring dan Evaluasi

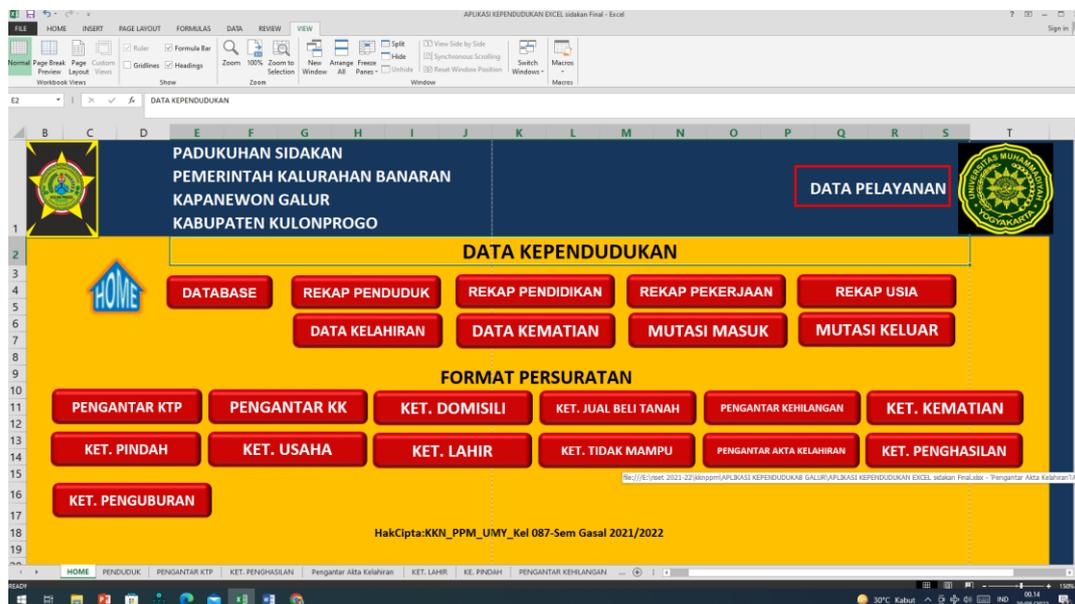
Tim inti pelaksana akan melakukan monitoring setidaknya 2 kali dalam 1 periode program pengabdian masyarakat tersebut. Selain proses monitoring, juga dilakukan evaluasi program-program yang telah dilakukan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pembuatan *Database* Dusun Sidakan

Dilihat dari masalah yang dialami oleh masyarakat Dusun Sidakan terdapat masalah terkait Administrasi di Padukuhan Sidakan. Berdasarkan hasil observasi terlihat minimnya pengetahuan masyarakat dalam pembuatan proposal, pengadministrasian serta data seluruh warga Padukuhan Sidakan. Melalui pengembangan *database* administrasi kependudukan ini dilakukan secara digital guna membuat tata kelola administrasi kependudukan di Dusun Sidakan menjadi efektif dan efisien.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh tim yaitu: Pengumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat dilacak menggunakan sesuatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut, kemudian *database* tersebut akan di serahkan kepada pihak Dusun. Proses dalam pengambilan *database* diawali dengan membuat form yang berisi biodata di setiap masing-masing kepala keluarga yang ada di Dusun Dungsuru, Kedua setelah pembuatan form, tim mulai melakukan pengambilan data dengan menggunakan form menggunakan metode pembagian kelompok yang disebar ke beberapa RT (1,2,3,4). Ketiga, setelah mendapatkan data tersebut tim mengolah data yang telah di dapat dengan menggunakan Microsoft Excel. Adapun bentuk luaran dari program ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Digitalisasi *Database* Kependudukan

Pembuatan *Database* berlangsung selama 25 hari. Di mulai dari penyuluhan program kerja di Balai Dusun Sidakan. Penyuluhan program kerja ini salah satunya ingin menyampaikan bagaimana proses pembuatan *Database* kependudukan. Tentunya program ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya persetujuan dari perangkat desa maupun tokoh masyarakat di Dusun Sidakan. Respon masyarakat untuk program *database* ini sangat positif.

2. Penomoran Rumah Warga Dusun Sidakan

Dilihat dari persoalan administrasi di Dusun Sidakan penomoran rumah adalah salah satu problema lama yang dialami. Guna memvalidasi keabsahan data tersebut, maka sebelum memulai penomoran rumah, tim melakukan pengambilan data informasi tentang warga sesuai dengan

format KK serta melakukan pemetaan Dusun Sidakan. Adapun output program penomoran rumah adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Penomoran Rumah

Proses dalam penomoran rumah hal yang dilakukan pertama yaitu, dilihat dari masalah yang berada dilapangan mengenai banyaknya data yang tidak sama dengan data yang ada saat ini (setelah tim melakukan observasi pendataan secara langsung) seperti, adanya pembangunan rumah baru yang belum terdata serta banyaknya KK tempel yang belum terdata. Kedua, beberapa rumah yang masih memiliki lokasi yang tidak sesuai dengan RT nya masing-masing. Oleh karena itu tim meminta bantuan kepada setiap masing-masing ketua RT yang bersangkutan untuk membantu proses pendataan di setiap RT nya.



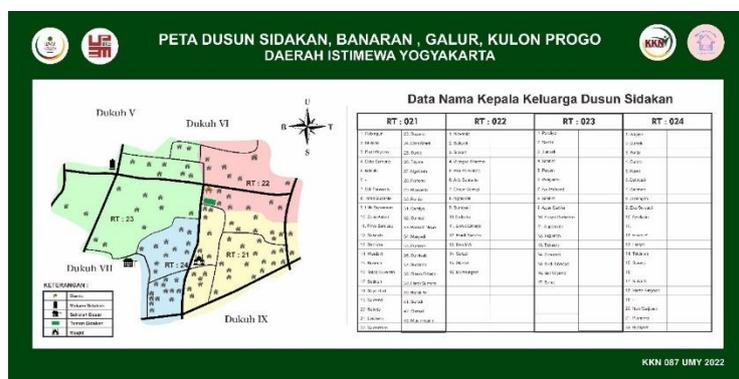
Gambar 3 Proses Pemasangan Penomoran Rumah

Respon masyarakat untuk program penomoran rumah ini sangat antusias dan berjalan dengan baik di Dusun Sidakan. Program ini sangat membantu masyarakat untuk memperjelas identitas alamat rumah. Karena selama ini masyarakat merasa kesulitan dalam mencari alamat kerabatnya yang berada di Dusun Sidakan.

3. Pembaharuan Peta Dusun Sidakan

Program pembuatan peta ini dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat luas dalam mengetahui keberadaan lokasi-lokasi penting maupun lokasi rumah warga yang berada di Dusun Sidakan. Tim melakukan pembuatan peta ini guna menindak lanjuti dari program sebelumnya yaitu penomoran rumah. Berikut output luaran yang dari program ini

Proses dalam program pembuatan peta di Dusun Sidakan ini memakan waktu 15 hari. Pertama, setelah mendapatkan data yang valid melalui program kerja sebelumnya yaitu *database* dan penomoran rumah. akhirnya tim memiliki gambaran jelas untuk memperbaharui peta yang sudah ada sebelumnya. Kedua, dalam proses pengambilan data memiliki beberapa kendala antara lain adanya bangunan baru yang tidak ada di peta lama, dan banyak nya kesalahan pada peta yang lama sehingga mempersulit tim dalam proses pembuatan peta. Ketiga, dalam proses pembuatan peta digital kami mendesain peta dari awal dengan konsep yang sama tetapi kami memberikan perubahan yang lebih detail pada peta. Seperti beberapa rumah yang letaknya diperbaharui karena dipeta sebelumnya rumah tersebut belum tercantum, ada beberapa tata letak rumah yang masih salah. Untuk mempermudah penyampaian informasi kami menambahkan simbol bintang pada keterangan di peta untuk menandakan masyarakat yang menggunakan KK tempel.



Gambar 4 Output Peta Dusun Dungsuru

Simpulan

Program pengabdian Penyusunan *Database* di Desa Banaran, Galur Kulonprogo telah berjalan baik dan lancar. Program ini mampu menciptakan *database* dusun terintegrasi dan update.

Program Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan mampu memberi manfaat kepada Desa Banaran berupa: (1) Dusun dan Desa memiliki *database* administrasi kependudukan yang terintegrasi yang memudahkannya untuk mencari data, mengidentifikasi maupun menganalisis data yang tersedia update terkait dengan kebijakan yang akan diformulasikan. (2) Warga dusun telah memiliki nomor rumahnya masing-masing yang memudahkannya untuk dapat diakses kerabatnya dengan cepat.

Daftar Pustaka

1. Dixon, C. (2015). *Rural development in the third world*. Routledge
2. Bhatia, A., & Kiran, C. (2016). *Rural development through E-Governance initiatives in India*. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), Special Issue-AETM, 16, 61-69.

3. Gupta, A. S. N., & Rana, S. (2018). *Unlocking the Enigma of e-Governance in Rural Areas in Perspective to State of India*. In Proceedings on International Conference on Emerg (Vol. 2, pp. 67-73)
4. Naldi, L., Nilsson, P., Westlund, H., & Wixe, S. (2015). *What is smart rural development?*. Journal of rural studies, 40, 90-101
5. Nica, E. (2015). *ICT innovation, internet sustainability, and economic development*. Journal of Self-Governance and Management Economics, 3(3), 24-29.
6. Permendagri 47/2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
7. Singh, S. K. (2017). *ICT for Rural Development: An Inclusive Framework for eGovernance*. The International Journal of Indian Psychology, Volume 4, Issue 2, No. 87, 70
8. Undang Undang Desa